



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 060/05/K.56.1/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan :

KESATU : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

KEDUA : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.777/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing OPD Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 27 Januari 2022

 **BUPATI MALINAU,**

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di-Tempat;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di-Tempat;
3. Kepala Bagian Organisasi Setkab. Malinau di-Tempat;
4. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR 060/05/K.56.1/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (%)	71,94
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah	9,37
		Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	67,58
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65
2	Indeks Ketahanan Nasional	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani (%)	100
			Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	83,36
		Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25
			Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	78,5
3	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Tnp, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)	4,82
4	Indeks Gini		Nilai Tukar Petani (Poin)	103,65
5	Jumlah Penduduk Miskin		Nilai Tukar Peternak (Poin)	103,2

6	Laju inflasi		Nilai Tukar Nelayan (Poin)	102,91
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70
			Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84
		Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas	70
			Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	70,60
		Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	80500000000
7	Indkes Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	14,40
			Persentase Daerah/Wilayah Banjir (%)	2
			Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67
			Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	28,01
		Meningkatnya kualitas PerumahanPermukiman	Persentase Pemukiman Yang Layak	77
			Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	7:9
		Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK	100
		Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	78,18

8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
			Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65
			Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25
9	Indeks RB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP (Poin)	CC
			Nilai LPPD (Poin)	Tinggi
		Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK (Poin)	WTP
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4-6
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Desa)	13,76

Malinau , 27 Januari 2022

BUPATI MALINAU



WEMPI W. MAWA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR 060/05/K.56.1/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (%)	<i>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur</i>	Dinkesdalduk dan KB, BPS	Dinkesdalduk dan KB
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah	<i>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan</i>	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan, BPS	Dinas Ketenagakerjaan
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
5	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Teneteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas Yang Tertangani (%)	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Satpol PP	Satpol PP
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	$Risk (R) = H \times V/C$	BPBD	BPBD

6	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki} - \text{laki}}$	DPPPAS	DPPPAS
7	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	<i>data diambil melalui survei dengan menyebarkan angket kepada pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di desa/kelurahan terpilih</i>	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	$IPK = \text{Jumlah Bobot Dimensi} \times \text{Jumlah Indeks Dimensi}$	Disbudpar	Disbudpar
8	Meningkatnya Produktifitas Sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (Tnp, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Nilai Tukar Petani (Poin)	$\frac{\text{Indeks yang Diterima Petani (It)}}{\text{Indeks yang Dibayar Petani (Ib)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	
		Nilai Tukar Peternak (Poin)	$\frac{\text{Indeks yang Diterima Peternak}}{\text{Indeks yang Dibayar Peternak}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	
		Nilai Tukar Nelayan (Poin)	$\frac{\text{Indeks yang Diterima Nelayan}}{\text{Indeks yang Dibayar Nelayan}} \times 100\%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$	Disbudpar	Disbudpar

10	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	Disperindag	Disperindag
11	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	<i>Jumlah nilai investasi daerah</i>	Dinas Perhubungan	DPMPTSP
12	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Persentase Daerah/Wilayah Banjir (%)	$\frac{\text{Jumlah daerah atau wilayah banjir}}{\text{Jumlah seluruh daerah atau wilayah}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	$\frac{\text{Jumlah desa yang terhubung dengan moda transportasi}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten yang berfungsi}}{\text{luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
13	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pemukiman Yang Layak	$\frac{\text{Luas pemukiman yang layak}}{\text{luas wilayah pemukiman}} \times 100\%$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim

		Rasio Rumah Layak Huni (Nilai Angka Rasio)	$\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah penduduk}}$	DPUPRPerkim	DPUPRPerkim
14	Berkembangnya Sistem Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani TIK	$\frac{\text{Jumlah wilayah yang terlayani TIK}}{\text{luas seluruh wilayah}} \times 100\%$	Diskominfo	Diskominfo
15	Berkembangnya Dukungan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi (%)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg menyediakan informasi publik secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	OPD se-Kabupaten Malinau	Diskominfo
16	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	DLH	DLH
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	$IP = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)2Rata - rata + (Ct/Lij)2Maksimum}}{2}$		
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	$IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (Ieu - 0,1)]$		
17	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP (Poin)	<i>persentase pencapaian target sama dengan perbandingan rencana dikurangi realisasi dikurangi rencana di bagi rencana dikali seratus persen</i>	OPD se-Kabupaten Malinau	Bagian Organisasi
		Nilai LPPD (Poin)	<i>pedoman di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020</i>	OPD se-Kabupaten Malinau	Bagian Tapem

18	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK (Poin)	<i>Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	OPD se-Kabupaten Malinau	BPKD
19	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{PAD}{jumlah\ pendapatan\ Daerah} \times 100$	Bidang Pajak Daerah BPKD	BPKD
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{Total\ dari\ nilai\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$	Disdukcapil, DPMPTSP, RSUD	Bagian Organisasi
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Desa)	$\frac{jumlah\ desa\ berkembang\ yg\ memenuhi\ kriteria\ desa\ mandiri\ per\ tahun\ berdasarkan\ indeks\ desa\ membangun\ per\ tahun}{jumlah\ desa\ berkembang\ (per\ awal\ tahun)} \times 100$	DPMD, BPS	DPMD

Malinau , 27 Januari 2022

BUPATI MALINAU



WEMPI W. MAWA